

## Tipe Pengungkapan Lingkungan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia

Utpala Rani<sup>1\*</sup>, Octavia Lhaksmi Pramudyastuti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Tidar

\*Corresponding author: [utpala@untidar.ac.id](mailto:utpala@untidar.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.24036/wra.v9i1.111934>

Diterima : 08 Maret 2021  
Direvisi : 13 Maret 2021  
Disetujui : 22 Maret 2021  
Tersedia daring : 30 April 2021

### Abstract

*This descriptive study explores the types of pro-environmental behavior that public companies in Indonesia disclose in their annual reports. In general, environmental disclosure is one of the company's channels to send signals to stakeholders about the company's attitude and commitment to environmental protection. In this study, the types of environmental disclosure for 160 public companies listed on the IDX were identified by content analysis. The results show that most of the sample companies committed greenwashing for the disclosure of their pro-environmental commitments in the annual reports. This indicates that environmental disclosure by public companies in Indonesia tends to be symbolic and oriented solely to regulatory compliance.*

**Keywords:** *Environmental Disclosure; Pro-Environment Behavior; Greenwashing; Public Company.*

### Abstraksi

Penelitian deskriptif ini mengeksplorasi tipe perilaku pro-lingkungan yang diungkapkan perusahaan publik di Indonesia dalam laporan tahunan. Secara umum, pengungkapan lingkungan merupakan salah satu kanal perusahaan untuk mengirimkan sinyal kepada pemangku kepentingan tentang sikap dan komitmen perusahaan terhadap perlindungan lingkungan. Pada penelitian ini, tipe pengungkapan lingkungan 160 perusahaan publik yang terdaftar di BEI diidentifikasi dengan analisis konten. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan sampel melakukan *greenwashing* terkait pelaksanaan komitmen pro-lingkungan yang diungkap dalam laporan tahunan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengungkapan lingkungan perusahaan publik di Indonesia masih cenderung bersifat simbolis dan berorientasi untuk pemenuhan regulasi.

**Kata-kata kunci:** Pengungkapan Lingkungan; Perilaku Pro-Lingkungan; *Greenwashing*; Perusahaan Publik

### Cara Membuat Kutipan (APA 6<sup>th</sup> style):

Rani, Utpala; Pramudyastuti, Octavia Lhaksmi. (2021). Tipe Pengungkapan Lingkungan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia. *Wahana Riset Akuntansi*, Vol 9 (1), 34-45.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Some rights reserved

## PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kecenderungan tipe pengungkapan lingkungan perusahaan publik di Indonesia. Pengungkapan dalam laporan tahunan merupakan salah satu *channel* yang digunakan perusahaan untuk mengirimkan sinyal kepada pemangku kepentingan tentang sikap perusahaan terhadap lingkungan. Peningkatan kepedulian masyarakat dunia pada isu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) berdampak pada perubahan perilaku perusahaan. Sebagian perusahaan memperbaiki pengelolaan lingkungan dengan mengimplementasi standar pengelolaan lingkungan bertaraf global—misalnya ISO 140001 maupun sertifikasi lingkungan berskala nasional. Selain itu perusahaan juga mengupayakan ekolabel untuk produk-produknya. Bagi kelompok ini, perilaku pro-lingkungan tidak sekedar bertujuan mengurangi dampak negatif operasi perusahaan terhadap lingkungan tetapi menjadi strategi untuk meningkatkan penerimaan masyarakat sekaligus membentuk reputasi sebagai perusahaan yang peduli pada lingkungan.

Namun demikian, setiap perusahaan menyadari bahwa berperilaku pro-lingkungan secara substantif atau menjadi lebih hijau bukanlah hal yang mudah. Keputusan perusahaan berperilaku pro-lingkungan berkonsekuensi pada dedikasi sejumlah besar sumberdaya untuk investasi pengelolaan lingkungan maupun perubahan konsep operasi perusahaan (Darnall & Edwards Jr, 2006; McCloskey & Maddock, 1994). Bagi sebagian perusahaan, hal ini merupakan keputusan yang berat sehingga mereka memilih berperilaku pro-lingkungan secara simbolis (Ferrón Vílchez, 2017). Perilaku pro-lingkungan simbolis bisa dilakukan dengan mengadopsi standar pengelolaan lingkungan pada level implementasi yang rendah (Aravind & Christmann, 2011) serta tidak sepenuhnya menginternalisasi kriteria penciptaan kinerja lingkungan (Delmas & Montes-Sancho, 2010). Bahkan, pengaruh sikap para pemangku kepentingan (Jupesta, Harayama, & Parayil, 2011; Law, De Lacy, Lipman, & Jiang, 2016; Wimala, Akmalah, & Sururi, 2016) yang besar terhadap level komitmen maupun pengungkapan lingkungan (Huang & Chen, 2010) justru mendorong terjadinya *greenwashing*. Perusahaan, terutama para *eco-mafia* (Massari & Monzini, 2004; Rege & Lavorgna, 2016; Torelli, Balluchi, & Lazzini, 2020) cenderung melakukan pengungkapan diskresioner positif tentang aktivitas pro-lingkungan sebagai strategi pengalihan perhatian dari masalah lingkungan akibat kegiatan operasionalnya (Hora & Subramanian, 2019). Strategi *greenwashing* pernah dilakukan oleh salah satu perusahaan publik di Indonesia, Asia Pulp & Paper milik Sinar Mas Grup untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus perusakan hutan yang telah dilakukan. Keberadaan *greenwashing* dalam pengungkapan lingkungan menyebabkan informasi yang disajikan tidak bisa dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh para pemangku kepentingan.

### Perilaku Pro-Lingkungan dan Pengungkapan Lingkungan

Konsep perilaku pro-lingkungan sangat erat dengan *environmental sustainability*. Meski demikian, kedua isu ini tidak sepenuhnya sama. Pro-lingkungan merupakan orientasi perilaku yang positif terhadap lingkungan, sedangkan *environmental sustainability* merupakan perspektif yang menyertakan pertimbangan aspek lingkungan dalam kebutuhan bisnis untuk mengurangi kerusakan, dan memberikan manfaat bagi lingkungan (Norton, Zacher, & Ashkanasy, 2015). Bagi perusahaan, kepedulian mereka pada lingkungan merupakan salah satu keunggulan yang perlu dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan—salah satunya melalui pengungkapan lingkungan dalam laporan tahunan. Manajemen memanfaatkan laporan tahunan untuk mengelola citra karena laporan tahunan merupakan *quality signaling device* perusahaan (Toms, 2002).

Pengungkapan lingkungan merupakan bentuk komunikasi tentang aktivitas pengelolaan dan kinerja lingkungan perusahaan beserta dampak keuangan yang timbul akibat keputusan tersebut, pada masa lalu, saat ini, maupun masa yang akan datang (Berthelot, Cormier, & Magnan, 2003). Oleh karena itu, pengungkapan lingkungan semestinya menggambarkan sikap (*attitude*), kebijakan (*policy*) dan perilaku (*behavior*) suatu perusahaan terhadap dampak lingkungan, emisi, polusi, *cleaning up*, *re-landscaping* maupun efisiensi energi, namun bukan didasari oleh alasan ekonomik (Campbell, 2004). Pada perkembangannya, pengungkapan lingkungan dan sosial tidak hanya menyediakan informasi sekaligus pemenuhan tanggungjawab kontrak sosial entitas dengan pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi media untuk meningkatkan status perusahaan (E. R. Gray & Balmer, 1998).

Apabila ditinjau dari perspektif teori pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan legitimasi, pengungkapan lingkungan merupakan sarana untuk menyelaraskan nilai-nilai manajemen dengan nilai-nilai sosial, mencegah serangan dari kelompok penekan (*pressure groups*), meningkatkan

reputasi perusahaan, serta menjaga dukungan atau penerimaan (*endorsement*) pihak eksternal (O'Donovan, 2002). Pengungkapan sosial—termasuk informasi lingkungan, bisa meningkatkan akuntabilitas perusahaan, meningkatkan sikap kompromi pemangku kepentingan, dan mendorong praktik pengelolaan perusahaan yang konsisten dengan prinsip *sustainable development* (Hess, 2008). Keberadaan pengungkapan lingkungan dipandang berkontribusi pada penguatan legitimasi suatu perusahaan karena mampu mengurangi ketidakpastian (*uncertainty*) yang dihadapi oleh para analis ketika menilai kinerja perusahaan (Cormier & Magnan, 2015).

Meski perspektif legitimasi memandang pengungkapan lingkungan sebagai sarana untuk menyelaraskan ekspektasi pemangku kepentingan dengan nilai-nilai internal perusahaan, secara implisit perspektif ini tidak menutup kemungkinan terjadinya pengungkapan lingkungan yang bersifat simbolis. Dengan kata lain, pengungkapan lingkungan yang dilakukan bisa saja bertujuan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan. Perusahaan yang tidak melaksanakan komitmen lingkungan secara substantif menunjukkan kepatuhan dan memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan dengan cara menerapkan taktik *concealment* agar seolah menjalankan regulasi lingkungan dan menerapkan aktivitas bisnis yang berwawasan lingkungan (Oliver, 1991). Hal ini terindikasi dari fenomena *framing*, *impression management*, maupun *greenwashing* pada pengungkapan lingkungan. Hal ini terjadi karena pemangku kepentingan tidak bisa sepenuhnya mengakses, menginterpretasi, serta menggunakan informasi tersebut (Gupta, 2008; Mason, 2008).

### **Greenwashing dalam Pengungkapan Lingkungan**

Secara sederhana, *greenwashing* merupakan istilah umum yang mencakup segala bentuk *misleading communication* yang menyebabkan pihak lain terlalu mempercayai kebenaran suatu informasi (Lyon & Montgomery, 2015). Fenomena ini bisa diartikan sebagai bentuk disinformasi kepada publik dengan tiga tujuan, yakni memperbaiki atau membentuk reputasi, publikasi *environmental promise* tanpa tindak lanjut, maupun upaya pembelokan informasi lainnya—misalnya *overstated* atau misrepresentasi dalam komunikasi publik (de Vries, Terwel, Ellemers, & Daamen, 2015). Dengan demikian, *greenwashing* merupakan kesengajaan untuk mengecoh (*misleading*) atau menipu (*deceiving*) konsumen menggunakan klaim yang keliru tentang praktik maupun dampak lingkungan perusahaan (Nyilasy, Gangadharbatla, & Paladino, 2014). Hal ini bisa terjadi ketika perusahaan dengan kinerja lingkungan yang buruk menyajikan komunikasi positif tentang kinerja lingkungan (Delmas & Burbano, 2011). Menurut Delmas dan Burbano (2011), faktor pencetus (*driver*) *greenwash* bisa dibedakan menjadi empat yakni *market external drivers*, *organizational drivers*, *individual psychological drivers*, dan *nonmarket external drivers*.

Pada konteks pengungkapan lingkungan, *greenwashing* bisa menjadi strategi pilihan perusahaan untuk menutupi kinerja lingkungan yang rendah akibat tekanan faktor eksternal—misalnya keinginan pemangku kepentingan agar perusahaan lebih berperilaku pro-lingkungan, namun tidak diimbangi dengan kemampuan (kemauan) perusahaan untuk berupaya melaksanakan komitmen lingkungan secara substantif (Laufer, 2003). Selain itu, *greenwashing* juga cenderung digunakan untuk menutupi *eco-crimes* (Massari & Monzini, 2004) atau *environmental crimes* (Walters, 2013) yang dilakukan perusahaan. *Greenwashing* bisa dilakukan antara lain dengan pengungkapan selektif dan tidak terkuantifikasi untuk informasi kinerja lingkungan (Lyon & Maxwell, 2011), pengutamaan aspek visual (gambar) dan penjelasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan komitmen lingkungan (Hrasky, 2012; Walker & Wan, 2012).

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk mendorong *greening* atau perilaku perusahaan yang lebih ramah lingkungan serta mengatur pengungkapan informasi lingkungan berupa dokumen AMDAL dan UKL-UPL dengan PP nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/ POJK.04/ 2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Meskipun semua dokumen itu terbuka untuk publik, masyarakat sangat sulit mengakses dokumen AMDAL dan UKL-UPL. Dengan demikian, laporan tahunan menjadi sumber informasi utama tentang aktivitas perusahaan pada aspek lingkungan.

OJK mengatur bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/ SEOJK.04/ 2016. Menurut aturan itu, pengungkapan informasi lingkungan masuk pada seksi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Pengungkapan bisa disajikan dalam laporan tahunan maupun laporan lain yang terpisah. Peraturan tersebut mensyaratkan informasi yang diungkapkan perusahaan mencakup kebijakan, jenis program,

dan biaya pada aspek lingkungan hidup antara lain berupa (1) penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang; (2) sistem pengelolaan limbah emiten atau perusahaan publik; (3) **mekanisme pengaduan masalah lingkungan**; dan (4) sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.

Meski pemerintah juga telah menyelenggarakan program penilaian kinerja lingkungan (PROPER) dan Peraturan OJK sebenarnya telah memuat kriteria minimal aspek yang harus diungkapkan (hal ini mengindikasikan sifat wajib saji untuk aspek itu), pelaksanaan program tersebut tidak banyak berdampak pada transparansi informasi maupun kualitas pengungkapan lingkungan perusahaan (Djuitaningsih & Ristiawati, 2015). Studi yang dilakukan oleh Djajadikerta dan Trireksani (2012) mengungkapkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) perusahaan publik di Indonesia lebih banyak memuat informasi mengenai “*community*” dan “*human resource*”. Temuan ini mengindikasikan bahwa motivasi utama perusahaan melakukan pengungkapan sosial dan lingkungan adalah mendapatkan pengakuan publik atas kecukupan perilaku sosial mereka. Informasi lingkungan yang disajikan juga cenderung deskriptif tanpa kejelasan *time frame*. Temuan serupa juga diungkapkan oleh penelitian Gunawan (2007, 2015) yang menunjukkan bahwa level pengungkapan lingkungan perusahaan publik di Indonesia masih rendah. Pengungkapan informasi TJSL yang berfokus pada isu sosial lebih condong pada tujuan menciptakan citra yang positif bagi perusahaan. Secara umum, temuan beberapa studi terdahulu tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat (*community*) merupakan pihak yang paling berpengaruh terhadap praktik pengungkapan sosial di Indonesia.

Jika studi terdahulu lebih banyak berfokus pada jenis informasi TJSL yang diungkap perusahaan, penelitian ini berusaha melengkapi pemahaman tentang praktik pengungkapan non keuangan perusahaan publik di Indonesia terkait tipe informasinya, terutama aspek lingkungan. Berbeda dari informasi sosial yang relatif lebih mudah terverifikasi dari interaksi perusahaan dengan masyarakat, verifikasi terhadap informasi lingkungan cenderung lebih sulit dilakukan. Hal ini terjadi karena akses publik terhadap informasi kinerja lingkungan perusahaan—misalnya hasil audit lingkungan PROPER, sangat terbatas. Selain itu, pemberian sanksi terhadap kasus perusakan lingkungan jarang mendapat perhatian pemberitaan—kecuali jika hal itu menimbulkan dampak yang sangat nyata, misalnya pada saat terjadi bencana kebakaran hutan dan kabut asap. Minimnya paparan media dan rendahnya sanksi hukum maupun sosial terhadap pelanggaran regulasi lingkungan mendorong keengganan perusahaan berperilaku pro-lingkungan. Ketiadaan kanal verifikasi terhadap informasi lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan publik juga membuka peluang terjadinya *greenwashing* untuk menyembunyikan ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metoda kualitatif untuk mendeskripsikan tipe pengungkapan lingkungan (substantif versus simbolis) dalam laporan tahunan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Identifikasi tipe pengungkapan lingkungan dilakukan dengan teknik analisis konten, yakni pengumpulan data yang terdiri dari tahap kodifikasi informasi kualitatif, kemudian memasukkan data dalam bentuk kategori sehingga menghasilkan skala kuantitatif pada berbagai level kompleksitas (Abbott & Monsen, 1979). Analisis konten memungkinkan peneliti mendapatkan simpulan yang *replicable* (dapat direplikasi) dan valid berdasarkan data yang diperoleh, sesuai konteks penelitian (Krippendorff, 1980, 2018). Instrumen analisis konten pada penelitian ini adalah *checklist* untuk mengidentifikasi informasi sebagai kriteria koding. Nilai dikuantifikasi berdasarkan pemenuhan kriteria.

Pada penelitian ini, kriteria *greenwash* untuk mengidentifikasi pengungkapan lingkungan diadaptasi dari studi Walker dan Wan (2012). Kesimpulan tentang kesimbolisan pengungkapan diperoleh dengan menilai seberapa jauh perusahaan mengungkapkan informasi lingkungan tanpa dukungan data yang relevan pada 13 kelompok isu lingkungan. Menurut Walker dan Wan (2012), *greenwash* menunjukkan bahwa suatu informasi yang tidak didasari oleh tindakan substantif atau bersifat simbolis. *Greenwashing* mengamufase minimnya komitmen lingkungan yang telah dilaksanakan perusahaan. Skor *greenwash* diperoleh dari selisih skor *symbolic action* (sejauhmana perusahaan **mendiskusikan komitmen atau rencana mereka terhadap perlindungan lingkungan**) dengan skor *substantive action* (sejauhmana perusahaan menjelaskan **tindakan yang telah dilakukan untuk mengurangi dan mencegah kerusakan lingkungan**). Rentang nilai 1 – 7 untuk *symbolic action* dan *substantive action* diberikan pada setiap kelompok isu, dengan 1= tidak ada *substantive*

*action* atau *symbolic action* (*no substantive or symbolic action*), dan 7= semua *substantive action* atau *symbolic action* (*all substantive or symbolic action*). Penilaian didasarkan pada pernyataan tentang tindakan yang **telah dilakukan** perusahaan untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Semakin spesifik dan detail penjelasan langkah-langkah yang telah diterapkan, semakin tinggi skor *substantive action*. Sebaliknya, semakin umum (*general*) informasi tentang pelaksanaan komitmen lingkungan maka semakin tinggi skor *symbolic action*. Dengan demikian, **nilai positif tinggi mengindikasikan *symbolic action* yang disertai sedikit atau tanpa *substantive action*** (skor *symbolic action* lebih besar daripada skor *substantive action*). Sementara itu, **nilai negatif tinggi mengindikasikan dominasi *substantive action* yang disertai sedikit atau tanpa *symbolic action*** (skor *symbolic action* lebih kecil daripada skor *substantive action*). Isu yang tidak dibahas dalam laporan tahunan diberi skor 0. Skor setiap perusahaan dihitung dari total nilai *symbolic action* diselisihkan dengan nilai *substantive action*. Secara matematis, penjelasan tersebut dinyatakan sebagai:

**Skor Greenwash (SG) = Skor Symbolic Action (SSy) – Skor Substantive Action (SSu)**

$SSy > SSu \rightarrow$  skor positif mengindikasikan kecenderungan *symbolic action* tanpa atau dengan sedikit *substantive action*.

$SSy < SSu \rightarrow$  skor negatif mengindikasikan kecenderungan *substantive action* tanpa atau dengan sedikit *symbolic action*.

Populasi penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015 pada semua sektor kecuali industri keuangan. Tahun 2015 dipilih sebagai periode pengamatan hasil penilaian *Annual Report Award* (ARA) 2015 menunjukkan penurunan kualitas pelaporan perusahaan publik di Indonesia. Perolehan nilai rata-rata laporan tahunan tahun 2015 adalah 61, lebih rendah daripada perolehan tahun sebelumnya yaitu 65. Hal ini kemungkinan terkait dengan tekanan dari masyarakat global terhadap Indonesia akibat kasus kebakaran hutan pada sejak tahun 2014. Berdasarkan data *Fact Book* 2016, perusahaan publik yang terdaftar di BEI sampai dengan akhir tahun 2015 berjumlah 533 perusahaan, dan dikelompokkan dalam sembilan klasifikasi industri. Perusahaan pada industri keuangan berjumlah 89, sehingga total populasinya berjumlah 444 perusahaan. Penentuan sampel dilakukan dengan metoda *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan beroperasi pada sektor yang potensial menyebabkan kerusakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan konsep *environmental degradation* untuk menjelaskan istilah kerusakan lingkungan. Menurut Johnson *et al* (1997), *environmental degradation* mengacu pada perubahan maupun gangguan terhadap lingkungan yang bersifat merugikan atau tidak diinginkan yang disebabkan oleh tindakan manusia. UU RI nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan perusakan lingkungan hidup sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (pasal 1 ayat 16). Menurut ayat 15 pada UU tersebut, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup yang bisa ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat melestarikan fungsinya. Walker dan Wan (2012) menggunakan empat kelompok industri untuk mewakili *visibly polluting industries*, yakni kimia, pertambangan, energi, perkebunan, dan kehutanan. Penelitian ini memperluas kriteria *visibly polluting industries* dengan memasukkan industri pada sektor manufaktur seperti *food and beverage* dan obat-obatan, serta sektor jasa seperti hotel dan rumah sakit. Hal ini dilakukan agar cakupan perusahaan yang diteliti mendekati bidang usaha perusahaan yang menjadi peserta PROPER. UU nomor 40 tahun 2007 dan PP nomor 47 tahun 2012 pasal 3 menyatakan bahwa kewajiban melaksanakan TJSJ mengikat Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam berdasarkan Undang-Undang. Menurut PP tersebut, *Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumberdaya alam* adalah *Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam*, sedangkan *Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumberdaya alam* adalah *Perseroan*

yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumberdaya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumberdaya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Berada pada kelompok industri yang memiliki lebih dari dua anggota. Meski umumnya industri didominasi oleh satu atau dua perusahaan, namun keberadaan lebih dari dua perusahaan memungkinkan terjadinya kompetisi. Hal ini penting diperhatikan karena umumnya *greenwashing* dilakukan dengan meniru pola pengungkapan perusahaan kompetitor yang melaksanakan komitmen lingkungan secara substantif.
3. Telah tercatat di BEI selama tiga tahun berturut-turut sebelum dan sesudah tahun 2015 (2014, 2015, 2016).
4. Saham perusahaan aktif diperdagangkan dengan jumlah hari perdagangan minimal 144 hari (dengan asumsi saham diperdagangkan minimal tiga hari per minggu atau 12 hari per bulan).

Pada penelitian ini, *greenwashing* tentang informasi lingkungan diidentifikasi pada empat seksi laporan tahunan perusahaan yakni: (1) laporan dewan komisaris; (2) laporan direksi; (3) profil perusahaan; (4) Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Laporan tahunan merupakan media komunikasi sekaligus sumber data utama bagi penelitian tentang pengungkapan lingkungan (R. Gray, Kouhy, & Lavers, 1995; Unerman, 2000). Penyertaan informasi lingkungan dalam laporan tahunan merupakan upaya manajemen untuk membujuk publik menerima cara pandang perusahaan, sekaligus memengaruhi persepsi dan reaksi pasar finansial maupun publik (O'Donovan, 2002). Adapun kelompok isu lingkungan yang digunakan oleh Walker dan Wan (2012) dan diadaptasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Kelompok isu lingkungan untuk skoring *greenwashing*

<b>Kelompok Isu Lingkungan</b>	
1. <i>Managing greenhouse emissions</i>	8. <i>Stakeholder engagement</i>
2. <i>Product innovation</i>	9. <i>Employee training</i>
3. <i>Lifecycle analysis</i>	10. <i>Conservation and restoration</i>
4. <i>Environmental management systems</i>	11. <i>Waste management</i>
5. <i>Technological development</i>	12. <i>Recycling</i>
6. <i>Carbon capture and storage</i>	13. <i>Independent reviews/ audits</i>
7. <i>Recovery projects</i>	

Sumber: Walker dan Wan (2012)

Analisis data dilakukan secara deskriptif, yakni dengan menyajikan rerata nilai SG (skor *greenwashing*) pada tiap industri maupun total SG (seluruh perusahaan). Informasi nilai SG pada setiap sektor industri bisa menjadi salah satu indikasi keseriusan perusahaan menyikapi masalah atau isu lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasi mereka. Keseriusan sikap ini terkait dengan keketatan regulasi yang mengikat suatu industri. Semakin ketat regulasi suatu industri, semestinya mendorong perusahaan untuk mengimplementasikan komitmen lingkungan secara serius sehingga mampu menyajikan informasi yang lebih cenderung substantif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk mengidentifikasi 286 perusahaan dari sektor non keuangan dan non perdagangan, yakni kelompok perusahaan dari industri perdagangan (jasa)—termasuk *Restaurant, hotel, and tourism* dan *Health care* karena keduanya termasuk target PROPER. Dua kelompok ini berpotensi merusak lingkungan akibat limbah berbahaya (misalnya akibat pemakaian alat-alat medis sekali pakai, cairan disinfektan, maupun sisa pengolahan makanan) dari aktivitas penyediaan jasa yang diselenggarakan sebagai sampel potensial pada tahap awal. Selanjutnya, peneliti mengecek kesesuaian kondisi perusahaan dengan kriteria sampel yang telah ditetapkan. Kriteria tersebut meliputi pertimbangan dampak langsung operasi perusahaan terhadap lingkungan, jumlah hari perdagangan, jumlah perusahaan dalam industri, serta kelengkapan data. Tahapan ini menghasilkan sampel sebanyak 160 perusahaan dari 21 sektor industri dan disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2. Tahap Pemilihan Sampel

No.	Industri		Awal	Kriteria Sampel dan Jumlah Perusahaan yang Dikeluarkan				Akhir	
	Klasifikasi	Kode		Kelompok	a	b	c		d
1.	<i>Agriculture</i>	12	<i>Plantation</i>	16	0	2	0	3	11
2.	<i>Mining</i>	21	<i>Coal mining</i>	22	0	6	0	1	15
		22	<i>Crude petroleum and natural gas production</i>	9	0	0	0	2	7
3.	<i>Basic industry and chemicals</i>	23	<i>Metal and mineral mining</i>	9	0	3	0	1	5
		31	<i>Cement</i>	5	0	0	0	2	3
		32	<i>Ceramics, glass, porcelain</i>	6	0	1	0	0	5
		33	<i>Metal and allied products</i>	16	0	6	0	3	7
		34	<i>Chemical</i>	10	0	5	0	1	4
		35	<i>Plastic and packaging</i>	13	0	4	0	3	6
		36	<i>Animal feed</i>	4	0	0	0	0	4
4.	<i>Miscellaneous industry</i>	38	<i>Pulp and paper</i>	9	0	1	0	2	6
		43	<i>Textile and garment</i>	19	0	11	0	2	6
5.	<i>Consumer goods industry</i>	51	<i>Food and beverages</i>	15	0	6	0	3	6
		53	<i>Pharmaceuticals</i>	11	0	4	0	1	6
		54	<i>Cosmetics and household</i>	6	0	2	0	0	4
6.	<i>Property, real estate, and building construction</i>	61	<i>Property and real estate</i>	45	0	12	0	9	24
		62	<i>Building construction</i>	9	9	0	0	0	0
7.	<i>Infrastructure, utilities, and transportation</i>	71	<i>Energy</i>	3	0	0	0	0	3
		72	<i>Toll road, airport, harbour, and allied product</i>	3	0	0	0	0	3
		74	<i>Transportation</i>	32	0	7	0	2	23
8.	<i>Trade, service, and investment</i>	94	<i>Restaurant, hotel, and tourism</i>	21	0	12	0	0	9
		96	<i>Health care</i>	3	0	0	0	0	3
<b>Total</b>				<b>286</b>	<b>9</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>160</b>

Keterangan kriteria pemilihan sampel:

- Pertimbangan dampak langsung industri terhadap lingkungan.*
- Jumlah hari perdagangan minimal 144 hari dalam setahun.*
- Jumlah perusahaan dalam industri yang sama minimal tiga.*
- Pertimbangan kelengkapan dokumen laporan tahunan dan laporan keuangan, serta aksesibilitas publik terhadap situs resmi perusahaan.*

Meski simbolisme dalam pengungkapan tidak selalu berarti negatif, minimnya informasi yang bersifat substantif yang terkait komitmen perusahaan untuk bersikap pro-lingkungan justru dikhawatirkan menyebabkan terjadinya *adverse selection* dalam pengambilan keputusan bisnis oleh pemangku kepentingan. Hasil analisis konten menunjukkan secara umum pengungkapan lingkungan setiap perusahaan mengandung informasi yang bersifat simbolik maupun substantif meskipun memang didominasi oleh pengungkapan lingkungan yang bersifat simbolis. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa sebagian besar sampel (102 perusahaan) ternyata memiliki skor *greenwash* positif. Hanya 54 perusahaan yang skor *greenwash*-nya bernilai negatif. Rerata skor *greenwash* seluruh sampel juga bernilai positif, meskipun tidak terpaut jauh antara nilai skor *symbolic*

*action* (SSy) dengan skor *substantive action* (SSu). Jika dianalisis berdasarkan kelompok industri (kelompok *agriculture*, kelompok *mining*, kelompok *basic industry and chemicals*, dan kelompok lain-lain). Hasil analisis tampak pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Komparasi tipe pengungkapan lingkungan berdasarkan kelompok industri

Skor <i>Greenwash</i>	Jumlah Perusahaan			
	Ind1 (n=11)	Ind2 (n=27)	Ind3 (n=35)	Ind4 (n=87)
+	4	14	25	59
<b>0</b>	0	0	1	3
-	7	13	9	25

**Keterangan:**

Ind1: kelompok *agriculture* (sampel: kode industri 12)

Ind2: kelompok *mining* (sampel: kode industri 21, 22, 23)

Ind3: kelompok *basic industry and chemicals* (sampel: kode industri 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38)

Ind4: Kelompok lain-lain (sampel: kode industri 43, 51, 53, 54, 61, 71, 72, 74, 94, 96)

Tabel 3 dan 4 menunjukkan bahwa sebagian perusahaan pada industri yang berdampak langsung pada lingkungan (misalnya pertambangan dan perkebunan) memiliki skor *greenwash* negatif. Hal ini kemungkinan terkait ketatnya regulasi maupun pengawasan pemerintah terhadap praktik pengelolaan lingkungan maupun pengungkapan informasi lingkungan yang dilakukan perusahaan pada industri tersebut. Perusahaan pada sektor industri ekstraktif juga menjadi target utama dalam PROPER Kementerian Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, sebagian perusahaan mengadopsi standar pengelolaan lingkungan serta mengikuti audit lingkungan secara berkala.

Sejumlah perusahaan pada industri non ekstraktif yang kegiatan operasi maupun layanannya semakin tampak dampaknya terhadap lingkungan (misalnya perusahaan *toll road*, *energy*, dan *pharmaceutical*) berusaha menyajikan informasi yang bersifat substantif. Meski demikian, banyaknya perusahaan yang melakukan *greenwash* dalam pengungkapannya mengindikasikan masih lemahnya pengawasan terhadap pengungkapan informasi lingkungan bagi publik. Pemerintah sampai saat ini belum menetapkan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam ketentuan OJK tentang pengungkapan informasi dalam laporan tahunan. Keterbatasan akses para pemangku kepentingan terhadap informasi kinerja lingkungan perusahaan bisa menjadi celah berkembangnya strategi *greenwashing* di Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena pemangku kepentingan sulit mengevaluasi kinerja lingkungan yang sebenarnya (Bowen & Aragon-Correa, 2014).

Tabel 4. Skor tipe informasi per industri

No.	Industri (Kode)	Rerata SSy	Rerata SSu	Rerata SG
1	<i>Plantation (12)</i>	11.00	14.64	-3.64
2	<i>Coal Mining (21)</i>	15.80	15.93	-0.13
3	<i>Crude Petroleum (22)</i>	9.43	9.57	-0.14
4	<i>Metal and Mining (23)</i>	10.20	15.60	-5.40
5	<i>Cement (31)</i>	23.00	24.67	-1.67
6	<i>Ceramics (32)</i>	13.80	10.80	3.00
7	<i>Metal and Allied (33)</i>	11.57	8.71	2.86
8	<i>Chemicals (34)</i>	13.00	8.25	4.75
9	<i>Plastics Packaging (35)</i>	11.17	10.00	1.17
10	<i>Animal Feed (36)</i>	20.75	15.00	5.75
11	<i>Pulp Paper (38)</i>	10.17	11.33	-1.17



No.	Industri (Kode)	Rerata SSy	Rerata SSu	Rerata SG
12	<i>Textille Garment (43)</i>	5.83	3.83	2.00
13	<i>Food Beverages (51)</i>	11.33	11.83	-0.50
14	<i>Pharmaceutical (53)</i>	10.50	12.17	-1.67
15	<i>Cosmetics (54)</i>	21.75	20.50	1.25
16	<i>Property (61)</i>	14.75	12.46	2.29
17	<i>Energy (71)</i>	9.00	14.00	-5.00
18	<i>Toll Road (72)</i>	8.67	16.00	-7.33
19	<i>Transportation (74)</i>	13.87	10.09	3.78
20	<i>Restaurants, Hotel (94)</i>	10.22	9.78	0.44
21	<i>Health Care (96)</i>	6.33	4.00	2.33
<b>Total</b>		<b>262.14</b>	<b>259.16</b>	<b>2.98</b>

Hasil analisis konten pada tabel 5 menunjukkan bahwa masalah *stakeholder engagement* (isu ke-8) justru merupakan informasi yang paling banyak diungkap oleh perusahaan. Perusahaan juga memilih isu *employee training* (isu ke-9) sebagai salah satu fokus informasi. Banyaknya perusahaan yang mengungkap isu hubungan dengan pemangku kepentingan pada penelitian ini mengonfirmasi temuan studi terdahulu (Djajadikerta & Trireksani, 2012; Gunawan, 2007, 2015) bahwa motivasi utama pengungkapan sosial dan lingkungan di Indonesia adalah mendapatkan pengakuan dari masyarakat (publik) terhadap keselarasan perilaku sosial yang ditunjukkan perusahaan dengan ekspektasi mereka. Adanya keselarasan tersebut diharapkan menciptakan kesan akuntabilitas sekaligus menciptakan citra positif sekaligus menguatkan dukungan terhadap eksistensi perusahaan, atau untuk mempertahankan *lisence to operate* (Kim & Lyon, 2015).

Tabel 5. Jumlah pengungkap untuk setiap isu lingkungan yang diidentifikasi

No.	Isu Lingkungan	Jumlah Perusahaan				Total Pengungkap
		Ind1 (n=11)	Ind2 (n=27)	Ind3 (n=35)	Ind4 (n=87)	
1	<i>Managing greenhouse emissions</i>	2	4	4	8	18
2	<i>Product innovation</i>	1	1	4	1	7
3	<i>Lifecycle analysis</i>	0	0	0	0	0
4	<i>Environmental management systems</i>	10	21	33	68	132
5	<i>Technological development</i>	3	0	3	1	7
6	<i>Carbon capture and storage</i>	0	0	2	3	5
7	<i>Recovery projects</i>	0	5	0	0	5
8	<i>Stakeholder engagement</i>	10	22	28	74	134
9	<i>Employee training</i>	7	17	22	70	116
10	<i>Conservation and restoration</i>	7	10	10	30	57
11	<i>Waste management</i>	5	11	22	40	78
12	<i>Recycling</i>	3	5	7	20	35
13	<i>Independent reviews/ audits</i>	0	2	2	3	7

Meski pengungkapan sebagian besar perusahaan telah mencakup isu *environmental management system* (isu ke-4), namun rerata skor *greenwash* yang positif mengindikasikan bahwa perusahaan menjadikan informasi tentang penerapan standar pengelolaan untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah capaian kinerja lingkungan yang sesungguhnya maupun dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan (Marquis, Toffel, & Zhou, 2016). Hal ini sejalan dengan temuan studi terdahulu bahwa pengungkapan CSR di Indonesia (termasuk aspek lingkungan) masih bersifat

simbolis (Nasution & Adhariani, 2016). Dampak terburuk dari kondisi ini adalah tidak terjadinya perbaikan kualitas lingkungan karena pengadopsian standar pengelolaan lingkungan hanya dilakukan secara simbolis (Ferrón Vílchez, 2017).

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tipe pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan publik di Indonesia. Hasil analisis konten menunjukkan bahwa sebagian besar pengungkapan lingkungan masih bersifat simbolis. Hal ini terindikasi dari adanya kecenderungan perusahaan untuk menyajikan informasi lingkungan sebatas pada komitmen mereka terhadap pelestarian lingkungan tanpa diikuti dengan kejelasan tahapan yang telah ditempuh. Terjadinya *greenwashing* pada pengungkapan lingkungan kemungkinan besar terkait ketidakjelasan sanksi yang diberikan kepada perusahaan apabila tidak memenuhi kriteria pengungkapan yang telah ditetapkan OJK. Keterbatasan utama penelitian ini terkait dengan penggunaan satu orang *scorer* atau pemberi skor pada saat analisis konten, meskipun pengecekan random terhadap hasil skoring juga telah dilakukan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu melibatkan lebih dari satu orang pemberi skor agar hasil yang diperoleh lebih reliabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, W. F., & Monsen, R. J. (1979). On the Measurement of Corporate Social Responsibility: Self-Reported Disclosures as a Method of Measuring Corporate Social Involvement. *Academy of Management Journal*, 22(3), 501-515. doi: 10.5465/255740
- Aravind, D., & Christmann, P. (2011). Decoupling of Standard Implementation from Certification: Does Quality of ISO 14001 Implementation Affect Facilities' Environmental Performance? *Business Ethics Quarterly*, 21(1), 73-102.
- Berthelot, S., Cormier, D., & Magnan, M. (2003). ENVIRONMENTAL DISCLOSURE RESEARCH: REVIEW AND SYNTHESIS. *Journal of Accounting Literature*, 22, 1-44.
- Bowen, F., & Aragon-Correa, J. A. (2014). Greenwashing in Corporate Environmentalism Research and Practice: The Importance of What We Say and Do. *Organization & Environment*, 27(2), 107-112. doi: 10.1177/1086026614537078
- Campbell, D. (2004). A longitudinal and cross-sectional analysis of environmental disclosure in UK companies—a research note. *The British Accounting Review*, 36(1), 107-117. doi: <https://doi.org/10.1016/j.bar.2003.09.001>
- Cormier, D., & Magnan, M. (2015). The Economic Relevance of Environmental Disclosure and its Impact on Corporate Legitimacy: An Empirical Investigation. *Business Strategy and the Environment*, 24(6), 431-450. doi: <https://doi.org/10.1002/bse.1829>
- Darnall, N., & Edwards Jr, D. (2006). Predicting the cost of environmental management system adoption: the role of capabilities, resources and ownership structure. *Strategic Management Journal*, 27(4), 301-320. doi: <https://doi.org/10.1002/smj.518>
- de Vries, G., Terwel, B. W., Ellemers, N., & Daamen, D. D. L. (2015). Sustainability or Profitability? How Communicated Motives for Environmental Policy Affect Public Perceptions of Corporate Greenwashing. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 22(3), 142-154. doi: <https://doi.org/10.1002/csr.1327>
- Delmas, M. A., & Burbano, V. C. (2011). The Drivers of Greenwashing. *California Management Review*, 54(1), 64-87. doi: 10.1525/cmr.2011.54.1.64
- Delmas, M. A., & Montes-Sancho, M. J. (2010). Voluntary agreements to improve environmental quality: symbolic and substantive cooperation. *Strategic Management Journal*, 31(6), 575-601. doi: <https://doi.org/10.1002/smj.826>
- Djajadikerta, H. G., & Trireksani, T. (2012). Corporate social and environmental disclosure by Indonesian listed companies on their corporate web sites. *Journal of Applied Accounting Research*, 13(1), 21-36. doi: 10.1108/09675421211231899
- Djuitaningsih, T., & Ristiawati, E. E. (2015). PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP KINERJA FINANSIAL PERUSAHAAN. *JURNAL AKUNTANSI UNIVERSITAS JEMBER*(2), 31-54% V 39. doi: 10.19184/jauj.v9i2.1238

- Ferrón Vílchez, V. (2017). The dark side of ISO 14001: The symbolic environmental behavior. *European Research on Management and Business Economics*, 23(1), 33-39. doi: <https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2016.09.002>
- Gray, E. R., & Balmer, J. M. T. (1998). Managing Corporate Image and Corporate Reputation. *Long Range Planning*, 31(5), 695-702. doi: [https://doi.org/10.1016/S0024-6301\(98\)00074-0](https://doi.org/10.1016/S0024-6301(98)00074-0)
- Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). Corporate social and environmental reporting: a review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 8(2), 47-77. doi: 10.1108/09513579510146996
- Gunawan, J. (2007). Corporate Social Disclosures by Indonesian Listed Companies: A Pilot Study. *Social Responsibility Journal*, 3(3), 26-34. doi: 10.1108/17471110710835554
- Gunawan, J. (2015). Corporate social disclosures in Indonesia: stakeholders' influence and motivation. *Social Responsibility Journal*, 11(3), 535-552. doi: 10.1108/SRJ-04-2014-0048
- Gupta, A. (2008). Transparency Under Scrutiny: Information Disclosure in Global Environmental Governance. *Global Environmental Politics*, 8(2), 1-7. doi: 10.1162/glep.2008.8.2.1
- Hess, D. (2008). The Three Pillars of Corporate Social Reporting as New Governance Regulation: Disclosure, Dialogue, and Development. *Business Ethics Quarterly*, 18(4), 447-482.
- Hora, M., & Subramanian, R. (2019). Relationship between Positive Environmental Disclosures and Environmental Performance: An Empirical Investigation of the Greenwashing Sin of the Hidden Trade-off. *Journal of Industrial Ecology*, 23(4), 855-868. doi: <https://doi.org/10.1111/jiec.12823>
- Hrasky, S. (2012). Visual disclosure strategies adopted by more and less sustainability-driven companies. *Accounting Forum*, 36(3), 154-165. doi: <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.02.001>
- Huang, Y.-F., & Chen, C.-J. (2010). The impact of technological diversity and organizational slack on innovation. *Technovation*, 30(7), 420-428. doi: <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2010.01.004>
- Jupesta, J., Harayama, Y., & Parayil, G. (2011). Sustainable business model for biofuel industries in Indonesia. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 2(2), 231-247. doi: 10.1108/20408021111185394
- Kim, E.-H., & Lyon, T. P. (2015). Greenwash vs. Brownwash: Exaggeration and Undue Modesty in Corporate Sustainability Disclosure. *Organization Science*, 26(3), 705-723. doi: 10.1287/orsc.2014.0949
- Krippendorff, K. (1980). Validity in content analysis. In E. Mochmann (Ed.), *Computerstrategien für die kommunikationsanalyse* (pp. 69-112). Frankfurt, Germany: Campus.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology*: Sage publications.
- Laufer, W. S. (2003). Social Accountability and Corporate Greenwashing. *Journal of Business Ethics*, 43(3), 253-261. doi: 10.1023/A:1022962719299
- Law, A., De Lacy, T., Lipman, G., & Jiang, M. (2016). Transitioning to a green economy: the case of tourism in Bali, Indonesia. *Journal of Cleaner Production*, 111, 295-305. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.12.070>
- Lyon, T. P., & Maxwell, J. W. (2011). Greenwash: Corporate Environmental Disclosure under Threat of Audit. *Journal of Economics & Management Strategy*, 20(1), 3-41. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1530-9134.2010.00282.x>
- Lyon, T. P., & Montgomery, A. W. (2015). The Means and End of Greenwash. *Organization & Environment*, 28(2), 223-249. doi: 10.1177/1086026615575332
- Marquis, C., Toffel, M. W., & Zhou, Y. (2016). Scrutiny, Norms, and Selective Disclosure: A Global Study of Greenwashing. *Organization Science*, 27(2), 483-504. doi: 10.1287/orsc.2015.1039
- Mason, M. (2008). Transparency for Whom? Information Disclosure and Power in Global Environmental Governance. *Global Environmental Politics*, 8(2), 8-13. doi: 10.1162/glep.2008.8.2.8
- Massari, M., & Monzini, P. (2004). Dirty Businesses in Italy: A Case-study of Illegal Trafficking in Hazardous Waste. *Global Crime*, 6(3-4), 285-304. doi: 10.1080/17440570500273416
- McCloskey, J., & Maddock, S. (1994). Environmental Management: Its Role in Corporate Strategy. *Management Decision*, 32(1), 27-32. doi: 10.1108/00251749410050651

- Nasution, R. M., & Adhariyani, D. (2016). Simbolis atau substantif? Analisis praktik pelaporan csr dan kualitas pengungkapan. *Jurnal akuntansi dan keuangan indonesia*, 13(1), 23-51.
- Norton, T. A., Zacher, H., & Ashkanasy, N. M. (2015). Pro-environmental organizational culture and climate *The psychology of green organizations*. (pp. 322-348). New York, NY, US: Oxford University Press.
- Nyilasy, G., Gangadharbatla, H., & Paladino, A. (2014). Perceived Greenwashing: The Interactive Effects of Green Advertising and Corporate Environmental Performance on Consumer Reactions. *Journal of Business Ethics*, 125(4), 693-707. doi: 10.1007/s10551-013-1944-3
- O'Donovan, G. (2002). Environmental disclosures in the annual report: Extending the applicability and predictive power of legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 344-371. doi: 10.1108/09513570210435870
- Oliver, C. (1991). STRATEGIC RESPONSES TO INSTITUTIONAL PROCESSES. *Academy of Management Review*, 16(1), 145-179. doi: 10.5465/amr.1991.4279002
- Rege, A., & Lavorgna, A. (2016). Organization, operations, and success of environmental organized crime in Italy and India: A comparative analysis. *European Journal of Criminology*, 14(2), 160-182. doi: 10.1177/1477370816649627
- Toms, J. S. (2002). FIRM RESOURCES, QUALITY SIGNALS AND THE DETERMINANTS OF CORPORATE ENVIRONMENTAL REPUTATION: SOME UK EVIDENCE. *The British Accounting Review*, 34(3), 257-282. doi: <https://doi.org/10.1006/bare.2002.0211>
- Torelli, R., Balluchi, F., & Lazzini, A. (2020). Greenwashing and environmental communication: Effects on stakeholders' perceptions. *Business Strategy and the Environment*, 29(2), 407-421. doi: <https://doi.org/10.1002/bse.2373>
- Unerman, J. (2000). Methodological issues - Reflections on quantification in corporate social reporting content analysis. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 13(5), 667-681. doi: 10.1108/09513570010353756
- Walker, K., & Wan, F. (2012). The Harm of Symbolic Actions and Green-Washing: Corporate Actions and Communications on Environmental Performance and Their Financial Implications. *Journal of Business Ethics*, 109(2), 227-242. doi: 10.1007/s10551-011-1122-4
- Walters, R. (2013). Eco Mafia and Environmental Crime. In K. Carrington, M. Ball, E. O'Brien & J. M. Tauri (Eds.), *Crime, Justice and Social Democracy: International Perspectives* (pp. 281-294). London: Palgrave Macmillan UK.
- Wimala, M., Akmalah, E., & Sururi, M. R. (2016). Breaking through the Barriers to Green Building Movement in Indonesia: Insights from Building Occupants. *Energy Procedia*, 100, 469-474. doi: <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.10.204>